

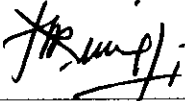


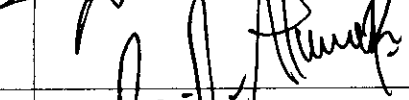


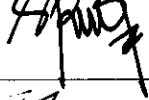

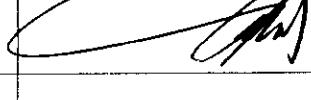

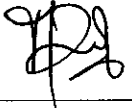

## BERITA ACARA HASIL RAPAT

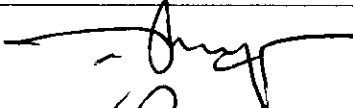
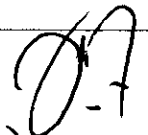
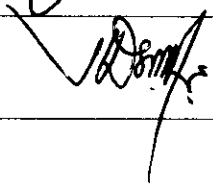
Pada Hari ini Kamis, Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga diadakan Rapat Koordinasi TP2DD tentang pemetaan permasalahan kanal pembayaran dan menyusun Berita Acara Hasil Rapat bersama terkait penyelesaian masalah kanal pembayaran bertempat di Ruang Rapat Kantor Bapenda, dengan menghasilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tabel pemetaan permasalahan etpd dari sisi kanal pembayaran, terlampir
2. Tabel Rencana aksi / kerja bulan juli sampai dengan desember 2023, terlampir
3. Hasil kesepakatan atas Rapat Koordinasi TP2DD
4. Absensi dan Notulen Rapat, terlampir

Demikian berita acara ini dibuat untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Yang menyetujui hasil rapat :

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Fitraeni, S.Sos	Kepala Bapenda	
Heberli, SE, M.Si	Sekretaris Bapenda	
Boni Purwoyudono	Pjs. Pimbid Bank Kaltimara	
Alfiannor	Officer Procus Bank Kaltimara	
Lisran, S.AP, M.AP	Kabid Perben dan Kasda BPKAD	
Mashari, ST	Penata Perijinan DPMPTSP	
Ratnawati	Bendahara Penerima Dishub	
M Hamzah Haris, SH. M.AP	Kasubbid Analisis dan Penyuluhan Bapenda	
Hamsah, ST, MM	Sekretaris Diskominfotik	
Yuyun. S	Staft Diskominfotik	
Freddyanto Gromiko, ST 	Sekretaris DLH	
Ronauli Simanjuntak, S.AP	Kasubbag Keu Dishub	

Marlina Puspasari, SE	Kabid Kemetrolgian DKUKMPP	
H. Romy Rieska S, SH	Kabid Pora Disbudporapar	
Denny Silvester, S.IP	Analisis Kebijakan Disbudporapar	

Peta Permasalahan ETPD Kab Nunukan Dari Sisi Kanal Pembayaran

No	Jenis Pemerimaan	Jenis Kanal	Pemda	Masyarakat	Bank RKUD	Infrastruktur
<b>BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>						
1	Pajak Daerah	Qris	Belum digunakan pada Pajak Daerah		Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya	Belum tersedia Perangkat Qris, telah tersedia kanal pembayaran melalui BTH, Mobile Banking, (PBB-P2 bisa menggunakan toko pedia)
2		ATM		dalam pembayaran pajak keengganan untuk memanfaatkan ATM karena lebih memilih datang langsung ke Teller untuk mendapatkan bukti pembayaran dengan stempel bank	memerlukan biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM	
3		Mobile Banking/ Aplikasi BTH	Tampilan mobile banking DG yang belum familiar sehingga agak menyulitkan bagi WP untuk memanfaatkan	Masyarakat belum seluruhnya memiliki mobile banking	prosentase nasabah yang memiliki mobile banking masih sedikit	
<b>DINAS KESEHATAN P2KB</b>						
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Qris, ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH	Qris yang ada di Puskesmas Nunukan Puskesmas Nunukan Timur, Puskesmas Sedadap Belum digunakan	Masyarakat belum banyak yang mengetahui Qris sebagai sarana pembayaran, Masyarakat masih menyukai membawa uang tunai	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya	Telah tersedia Perangkat Qris wilayah puskesmas pulau Nunukan, masih ada Puskesmas yang belum ada jaringan internet

**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN (DKUKMPP)**

1	Retribusi Pelayanan Pasar	Qris, ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH	Yang berjalan selama ini kami mempunyai petugas pungut retribusi pelayanan pasar (Pengurus Pasar), yang kemudian setelah dihimpun baru disetor ke Kasda.	Tidak semua masyarakat pedegang menggunakan Android, Tidak tersedia ATM di Pasar terdekat, Tidak semua masyarakat pedegang menggunakan mobile banking	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRIS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya	Belum tersedianya Perangkat Qris Retribusi Pelayanan Pasar
2	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang  2024 UU HKPD Retribusi Dihapus	Qris, ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH	Untuk pembayaran Retribusi Tera, Perusahaan melakukan pembayaran melalui BTH	Masyarakat belum familiar sehingga menyulitkan lebih suka uang tunai, Keengganan untuk membayar melalui ATM karena nilai retribusi terlalu kecil, Masyarakat belum seluruhnya memiliki mobile banking	memerlukan biaya yang cukup besar untuk menambah jumlah mesin ATM, penawaran untuk mengunduh mobile banking kepada masyarakat masih belum optimal	Belum tersedianya Perangkat Qris

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

1	Retribusi Ply Persampahan/Kebersihan	Qris, ATM, Mobile Bangking, Aplikasi BTH	Belum digunakan, Retribusi sampah masih manual, belum ada progres menuju non tunai. Dan masih berusaha memperluas area pemungutan sampah dan terbatas dengan SDM juru pungut retribusi. Kami masih menjajaki untuk kerjasama dengan PDAM supaya dalam pembayaran PDAM include dengan pembayaran Retribusi Persampahan	Tidak setiap masyarakat faham informatika, Tidak setiap masyarakat memiliki rekening Bank, Tidak adanya sanksi tegas sehingga masyarakat berfikir bahwa pembayaran retribusi pelayanan sampah bukan merupakan suatu kewajiban	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan Qris dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya, kami akan koordinasi lebih lanjut ke DLH	Belum tersedianya Perangkat Qris
---	---	--	--	---	--	----------------------------------

**DISKOMINFOTIK**

1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Video Tron	Qris, ATM, Mobile Bangking, Aplikasi BTH	Belum digunakan, retribusi ikan dari masyarakat dalam videotron hanya menjadi catatan dikominfo, kami tidak pernah menerima uang, wajib retribusi sendiri yang akan membayar melalui teler bank	Pelaku Usaha belum Bernminat untuk mengiklankan produknya melalui video tron	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan Qris dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya	Belum tersedianya Perangkat Qris
---	--	--	---	--	--	----------------------------------

**DISBUDPORAPAR**

1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Qris, ATM, Mobile Bangking, Aplikasi BTH	Belum digunakan, kendalanya pembayaran penggunaan fasilitas olahraga masih hasil kumpul-kumpul anak-anak yang olahraga dan disetorkan ke bendahara	Masyarakat masih suka melakukan pembayaran secara tunai ke bendahara penerima	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan Qris dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya,	Belum tersedianya Perangkat Qris
---	--	--	---	---	---	----------------------------------

			<p>penerima, penggunaan Fasilitas kadang perjam, tidak menentu.</p> <p>Sarana olahraga bisa menggunakan QRIS tapi belum 100%, karena penggunaan sarana olahraga tidak tetap/ tidak menentu tergantung yang menyewa tempat sarana olah raga (lapangan futsal)</p>			
2	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Qris, ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH	<p>Belum digunakan Untuk Retribusi Tempat Rekreasi / wisata bisa menggunakan QRIS</p>	<p>Masyarakat lebih suka membayar uang tunai karena nilai retribusinya kecil, belum semua pengunjung mempunyai Mobile Banking</p>	<p>Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRIS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya,</p>	<p>Telah tersedianya Perangkat Qris Retribusi Tempat Rekreasi hutan Mangrove Sedadap</p>
<b>DPMP TSP</b>						
1	Retribusi PBG	Qris, ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH	<p>Untuk ATM, Mobile Banking, BTH sudah bisa dilakukan pembayaran PBG, yang belum terkoneksi yaitu QRIS dengan BTH untuk pembayaran Retribusi PBG, kami siap saja dalam penggunaan QRIS</p>	<p>Pemohon PBG yang melakukan pembayaran retribusi melalui ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH, sudah berjalan 1tahun</p>	<p>Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRIS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya,</p>	<p>Belum tersedianya Perangkat Qris</p>

**DINAS PERHUBUNGAN**

1	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Qris, ATM, Mobile Banking, Aplikasi BTH	Belum Digunakan, Pemungutan dilakukan secara tunai, Kemudian petugas pemungut menghimpun kemudiam bendahara penerima menyetor ke teller Bank	Masyarakat masih suka menggunakan uang tunai karena nilai retribusi yang kecil	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRIS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya, Belum Tersedianya Perangkat Qris, Penyediaan Free Wifi di Area Publik Belum Optimal
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Qris, ATM, Mobile Banking	Qris Sudah Terpasang akan tetapi belum optimal, Belum optimalnya sosialisasi penggunaan kanal digital sebagai pembayaran. 2 tahun yang lalu sdh menggunakan QRIS untuk retribusi parkir khusus di RSUD namun penggunaannya belum maksimal. Kendala terhadap pelaksanaan berkelanjutan pembayaran elektronik pada sosialisasi/pembinaan penggunaan pembayaran digital, lebih masalah di internal kami	Masyarakat belum Mengetahui Qris sebagai sarana pembayaran	Kami pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRIS dan Kanal Pembayaran non tunai lainnya, kami akan
3	Retribusi Pelayanan Kelelabuhanan	Qris, ATM, Mobile Banking	Belum Digunakan Pemungutan dilakukan secara tunai, Mohon bantuan Bank Kalitimara untuk percepatan penggunaan /	Masyarakat belum Mengetahui Qris sebagai sarana pembayaran	Belum Tersedianya Perangkat Qris, Penyediaan Free Wifi di Area Publik Belum Optimal

		launching QRIS pada retribusi kepelabuhanan, (Pelabuhan Sei Jepun)		Koordinasi lebih lanjut ke Dishub	
--	--	--	--	-----------------------------------	--



Rencana Aksi / Kerja Bulan Juli s/d Desember 2023, yang akan di evaluasi pada Bulan November 2023

NO	URAIAN KEGIATAN	TAHAPAN / AKTIVITAS	TARGET	PIC	KETTERANGAN
<b>BAPENDA</b>					
1	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan PBB-P2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS dan merchant lainnya</li> <li>2. Agen Laku Pandai sbg Pemungut PBB-P2</li> <li>3. Sosialisasi dan himbauan untuk bertransaksi secara non tunai baik dengan QRIS, mobile banking maupun kanal digital lainnya. Untuk awal diarahkan pembayaran PBB-P2</li> </ol>	Agustus s/d Desember 2023	BAPENDA dan Bank Kalimantanara	
2	Penggunaan QRIS dan Mobile banking untuk pembayaran Pajak Restoran dan Pajak Daerah Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS</li> <li>2. Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Pajak untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking</li> </ol>	Agustus s/d Desember 2023	BAPENDA dan Bank Kalimantanara	
3	Perjanjian Kerjasama Biller Aggregator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun Draft PKS Ttg Biller Aggregator Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	Juli s/d Agustus 2023	BAPENDA dan Bank Kalimantanara	
<b>DINAS PERHUBUNGAN</b>					
1	Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi Pegawai Pemerintah Kabupaten Nunukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS, dan merchant lainnya, Untuk awal diarahkan pembayaran Retribusi Parkir Tepi Jalan Berlangganan, Retribusi Kepelabuhanan di Sei Jepun, Retribusi Parkir tempat khusus (RSUD)</li> <li>2. Sosialisasi dan himbauan untuk bertransaksi secara non tunai baik</li> </ol>	Agustus s/d Desember 2023	DINAS PERHUBUNGAN dan Bank Kalimantanara	

		<p>dengan QRIS, mobile banking maupun kanal digital lainnya.</p> <p>3. Sebagai pilot project penempatan QRIS di Pelabuhan Sei Jepun</p>			
2	<p>Penggunaan QRIS dan Mobile banking untuk pembayaran :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum /Berlangganan</li> <li>2. Retribusi Kepeleabuhanan,</li> <li>3. Retribusi Tempat Parkir Khusus.</li> <li>4. Retribusi Jjin Trayek</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS dan Merchant Lainnya</li> <li>2. Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada Wajib Retribusi untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking</li> </ol>	Agustus s/d Desember 2023	DINAS PERHUBUNGAN dan Bank Kaltimara	Telah tersedia kanal pembayaran QRIS Retribusi Tempat Parkir Khusus di RSUD
<b>DINKES P2KB</b>					
1	<p>Penggunaan QRIS dan Mobile banking untuk pembayaran Retribusi pelayanan kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS</li> <li>2. Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada untuk memanfaatkan QRIS dan Mobile Banking</li> </ol>	Agustus s/d Desember 2023	DINKES P2KB dan Bank Kaltimara	Telah tersedia Kanal Pembayaran QRIS di Loket Puskesmas Nunukan, Puskesmas Nunukan Timur, Puskesmas Nunukan Selatan
<b>DKUMPP</b>					
1	<p>Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang : pelaksanaan pembayaran non tunai bagi perusahaan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS</li> <li>2. Sosialisasi dan himbauan untuk bertransaksi secara non tunai</li> </ol>		DKUMPP dan Bank Kaltimara	BUKTIKIPD Retribusi Tera di Bupus

<p>2</p> <p>Retribusi Pelayanan Pasar : Pelaksanaan digitalisasi pembayaran Retribusi bagi pelaku usaha</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS dan Merchant lainnya</li> <li>2. Sosialisasi digitalisasi pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar pada pelaku usaha dipasar</li> <li>3. Sosialisasi Promosi Usaha menggunakan layanan media promosi bagi pelaku usaha lainnya</li> </ol>	<p>Agustus s/d Desember 2023</p>	<p>DKUKMPP dan Bank Kalimantara</p>	
<p><b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b></p>				
<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendataan terhadap Wajib Retribusi Pelayanan Persampahan</li> <li>2. Pelaksanaan Pembayaran Retribusi Pelayanan Kebersihan secara digital</li> <li>3. PKS PDAM ttg pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan</li> <li>4. Auto debet retribusi pelayanan persampahan di rek ASN</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS dan Merchant Lainnya</li> <li>2. Pengumpulan Data untuk menentukan tarif yang dikenakan pada masing-masing warga</li> <li>3. Sosialisasi dengan Camat, Lurah/ Kepala Desa, dan Ketua RT</li> <li>4. Sosialisasi lewat tatap muka, media cetak dan media elektronik terkait Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Sampah/Kebersihan di Kabupaten Nunukan</li> <li>5. Mengoptimalkan juru pungut</li> </ol>	<p>Agustus s/d Desember 2023</p>	<p>DLH dan Bank Kalimantara, PDAM</p>	
<p><b>DISKOMINFOTIK</b></p>				
<p>1</p> <p>Penarikan retribusi pemakaian kekayaan daerah (video tron)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS, Mobile Banking, Merchant Lainnya</li> <li>2. Sosialisasi dan promosi pemakaian video tron kepada pelaku usaha</li> </ol>	<p>Agustus s/d Desember 2023</p>	<p>DISKOMINFOTIK dan Bank Kalimantara</p>	

**DISBUD PORAPAR**

<p>1. Pelaksanaan Transaksi Non tunai bagi pengunjung tempat wisata (retribusi pelayanan tempat rekreasi dan olah raga)</p> <p>2. Pelaksanaan Transaksi Non Tunai bagi pengguna jasa pemaknaan asset kekayaan daerah (retribusi pemaknaan kekayaan daerah)</p>	<p>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS Mobile Banking, Merchant Lainnya</p> <p>2. Sosialisasi dan edukasi secara langsung kepada pengunjung/ Wajib Retribusi</p>	<p>Agustus s/d Desember 2023</p>	<p>DISBUDPORAPAR dan Bank Kaltimara</p>	<p>Telah tersedia kanal pembayaran Qris di Tempat Rekreasi Manggrove Sedadap</p>
--	--	----------------------------------	---	--

**DPMPPTSP**

<p>1. Penggunaan Qris, Mobile Banking, Merchant Lainnya untuk Pembayaran Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung</p>	<p>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS, Mobile Banking, Merchant Lainnya</p> <p>2. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait penggunaan Qris, Mobile Banking, Merchant Lainnya</p>	<p>Agustus s/d Desember 2023</p>	<p>DPMPPTSP dan Bank Kaltimara</p>	<p>Pembayaran Retribusi PBG sudah menggunakan ETPD, kecuali QRIS yang belum tersedia</p>
--	---	----------------------------------	------------------------------------	--

**RETRIBUSI PEMAKNAAN KEKAYAAN DAERAH (RUMAH DINAS , BARAK)**

<p>1. Penggunaan Qris, Mobile Banking, Merchant Lainnya Agustus s/d Desember 2023 untuk Pembayaran Retribusi Pemaknaan Kekayaan Daerah</p>	<p>1. Penyediaan Kanal Pembayaran QRIS, Mobile Banking, Merchant Lainnya</p> <p>2. Sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait penggunaan Qris</p> <p>3. SE Bupati kepada ASN pengguna Rumah Dinas dan Barak</p>	<p>Agustus s/d Desember 2023</p>	<p>BAPENDA dan Bank Kaltimara</p>	
--	---	----------------------------------	-----------------------------------	--



PEMERINTAH KABUPATEN NUNUKAN  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Sungai Jepun – Mansapa Kantor Bupati Nunukan Lt II Kode Pos 77482  
E-mail : bapenda.nunukan@email.com

**DAFTAR HADIR**

Hari/Tanggal : Kamis, 13 Juli 2023  
Jam : 09.00 Wite s/d Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Bapenda  
Acara : Rakor TP2DD tentang pemetaan permasalahan kanal pembayaran dan menyusun berita acara komitmen bersama terkait penyelesaian masalah kanal pembayaran

NO	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	BONI PURNOYUDONO	Pjs. Pimbid Bankaltimora	1.
2.	Alfiarman	Officer Procus Bankaltimora	2.
3.	Lisran	Kebid Perband	3.
4.	Romy	Kabid PPS	4.
5.	FITRAENI	Ka. BAPENDA	5.
6.	MASRARI	Manag DA Pemas	6.
7.	KOTIKAWATI	DINAS PERHUKUMBAH	7.
8.	ENDIT DARMAYANTI	BPKAD	8.
9.	M. HAMZAH.	Koordinator Admin & Logistik BAPENDA	9.
10.	HAMSAH	KOMINFO	10.
11.	Juyun S.	Kominfo	11.
12.	Freddyanto G	DLH	12.
13.	Ronauli Simanjuntak	DitHub	13.
14.	MARLINB PUSPISAN	DKU/KMPP	14.
15.	Ritha P	Kamdag Suran Rp	15.
16.	Denny S	Distudpropan	16.
17.	Heberli	cekban	17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

21.			21.	
22.				22.
23.			23.	
24.				24.
25.			25.	
26.				26.
27.			27.	
28.				28.
29.			29.	
30.				30.

Kepala

FITRAENI, S.Sos  
NIP. 19731130 200112 2 002

Notulen Rakor TP2DD tentang pemetaan permasalahan kanal pembayaran dan menyusun berita acara komitmen bersama terkait penyelesaian masalah kanal pembayaran.

Tanggal :13 Juli 2023  
Waktu :09.00 – 13.00 Wita  
Tempat :Ruang Rapat Bapenda  
Pimpinan Rapat :Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Notulis :Susilawati (Analisis Kebijakan Ahli Muda)  
Peserta :1. Perwakilan Bank Kaltitara  
2. Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup  
3. Perwakilan Dinas Kominfotik  
4. Perwakilan Dinas Perhubungan  
5. Perwakilan Dinas Budporapar  
6. Perwakilan Dinas Perhubungan  
7. Perwakilan BPKAD  
8. Perwakilan DPMPTSP  
9. Perwakilan DKUKMPP

Pembahasan : Rakor TP2DD tentang pemetaan permasalahan kanal pembayaran dan menyusun berita acara komitmen bersama terkait penyelesaian masalah kanal pembayaran

Hasil pembahasan :

1. Kaban Bapenda : Untuk September 2023 akan diadakan championship TP2DD se Indonesia, kegiatan 2023 diikuti championship TP2DD se Indonesia Tahun 2024.
2. Upaya untuk mengikuti championship.
3. Proses yang dilakukan hari ini untuk selanjutnya mejadi bahan HLM (High Level Meeting Rakor yang dipimpin Bupati).

4. Retribusi penyeterannya non tunai dari bendahara dan diharapkan dari wajib retribusi .
5. Menampilkan apa yang diunggulkan dalam keikutsertaan dalam championship 2024.
6. Diarahkan ke non tunai untuk menghindari kebocoran2 PAD/kas daerah.
7. Opd pengelola pajak dan retribusi dapat mengimplementasikan apa yang bisa menjadi peluang dalam pengisian rencana aksi kerja bulan Juli-Desember 2023 karena rencana aksi ini akan menjadi penilaian.
8. Bank Kaltimara : pada prinsipnya siap mendukung penggunaan QRIS dalam peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
9. Diskominfo : biaya iklan dari masyarakat dalam videotron hanya menjadi catatan dikominfo.
10. Disbudporapar : kendalanya pembayaran penggunaan fasilitas olahraga masih hasil kumpul-kumpul anak-anak yang olahraga dan disetorkan ke bendahara penerima, penggunaan Fasilitas kadang perjam, tidak menentu.
11. Dinas Lingkungan Hidup: Retribusi sampah masih manual, belum ada progres menuju non tunai. Dan masih berusaha memperluas area pemungutan sampah dan terbatas dengan SDM juru pungut retribusi. Kami masih menjajaki untuk kerjasama dengan PDAM supaya dalam pembayaran PDAM include dengan pembayaran Retribusi Persampahan.
12. Kaban Bapenda: Bank Kaltimara mempersiapkan QRIS Statis atau pada saat pembayaran PDAM bisa disertakan pungutan retribusi sampah.
13. DKUKMPP: tahun 2023 retribusi pasar sudah ada petugas2 yang menagih ke pelaku usaha. Kedepannya akan diarahkan ke non tunai.
14. Bank Kaltimara : tidak mengenakan biaya pada qris sesama Bank Kaltimara



15. Dishub : 2 tahun yang lalu sdh menggunakan QRIS untuk retribusi parkir khusus di RSUD namun penggunaannya belum maksimal. Kendala terhadap pelaksanaan berkelanjutan pembayaran elektronik pada sosialisasi/pembinaan penggunaan pembayaran digital, lebih masalah di internal kami.
16. Kaban Bapenda: Mohon bantuan Bank Kaltimara untuk percepatan penggunaan / launching QRIS pada area/potensi retribusi parkir tempat umum, parkir tepat khusus/ retribusi kepelabuhanan, (Pelabuhan Sei Jepun)
17. Bank Kaltimara: OPD/masyarakat bisa datang ke Bank Kaltimara untuk memperoleh informasi tentang QRIS. Atau diupayakan untuk mengumpulkan OPD/masyarakat dan akan dilakukan sosialisasi.
18. DPMTSP : Untuk pembayaran retribusi PBG tidak ada permasalahan menggunakan no virtual akun di BTH akan dilakukan kordinasi dengan pihak bapenda terkait koneksi antara BTH dan QRIS, kami siap saja dalam penggunaan QRIS.
19. Kaban Bapenda: akan ada integrasi BTH dengan QRIS.
20. BPKAD: Apakah non tunai sudah siap di daerah. Pada dasarnya setuju dengan sistem non tunai ini. Karena kondisi geografis sehingga menghambat masyarakat dalam menyetorkan pajak adakah pasal jika dibuatkan perbup tentang bagaimana menghadapi hambatan dan tantangan kondisi tersebut atau apa yang dimaksud dengan instrumen lainnya dalam pasal 14 Permendagri Nomor 56 /2021 tentang ETPD,
21. Kaban bapenda : wilayah blank spot tidak perlu menjadi perhatian, cukup wilayah yang berpotensi saja.
22. Bank Kaltimara: Untuk daerah blank spot, sudah ada percepatan pelaksanaan agen lakupandai, ada sosialisasi agar setiap RT dapat menjadi agen lakupandai, terutama daerah krayan di daerah long bawan, agaen laku pandai dapat melakukan pembayaran 24 jam. Dan dalam rangka percepatan penggunaan QRIS maka dilakukan sosialisasi disekolah-sekolah, harapannya QRIS dimulai dulu dari

ASN dan Pegawai Bank sehingga bisa menjadi contoh bagi masyarakat.

23. Sekban Bapenda: Permasalahn belum semua tergali kenapa penggunaan non tunai belum maksimal dilaksanakan. Supaya bisa dilaksanakan pemetaan masalah sudah dilaksanakan selanjutnya apa rencana aksi. Untuk dishub area mana yang bisa menjadi fokus apakah di RSUD atau Pelabuhan, dishub dapat komunikasi secara inten ke Bank Kaltimtar.
24. Kaban Bapenda : Dishub 2021 sdh melaksanakan QRIS. BI siap mendukung jika kita sudah siap launching QRIS. ASN bisa menjadi pelopor QRIS.
25. M. Hamzah Bapenda : Tahapan rencana aksi bisa di ubah/diganti menyesuaikan kondisi dari OPD Pemungut Retribusi.
26. BPKAD : saran fokus pada RT untuk memungut PBB-P2.
27. Kaban Bapenda : sosialisasi belum dilakukan secara menyeluruh, Membuat pola agar ASN konsisten menggunakan non tunai.
28. Disbudporapar : Sarana olahraga bisa menggunakan QRIS tapi belum 100%, karena penggunaan sarana olahraga tidak tetap/ tidak menentu tergantung yang menyewa tempat sarana olah raga (lapangan futsal).
29. BPKAD : Penggunaan QRIS/merchant lainnya terhadap pemakaian kekayaan daerah dapat diperkuat dengan Surat Edaran Bupati.